

DATA INVENTARISASI KSAD KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR 100/60/V/PEM.2023
TANGGAL 23 MEI 2023
PERIHAL Permintaan Data PD tentang KSAD dan KSDPK

NO	Judul Kerjasama	Tahun	Keluaran/Output	Objek Kerjasama	Hasil/Outcome	Jenis Kerjasama	Para Pihak	Waktu Pelaksanaan	Dukungan Anggaran	Keterangan/Catatan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Penyediaan Dan Penggunaan Jasa Perbankan	2019	Meningkatkan dan menyinergikan perbankan Lamandau dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau	Pengelolaan keuangan berbasis digital payment akan dikelola oleh pihak kedua	Mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah daerah kabupaten Lamandau dengan prinsip win win solution, transparan, akuntabel, obyektif, serta kehati-hatian	Sinergi antar Pemerintah Kabupaten Lamandau	- Pemerintah Kabupaten lamandau	2023	Di bebaskan pada masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat
							- PT. BRI Tbk			
2	MoU Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau Dengan Bank Sampah Induk Bukit Hibul	2023	Program bank sampah merupakan pengelolaan sampah dalam masyarakat yg menyamakan kedudukan sampah serupa dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung & pendidikan masyarakat terhadap sampah agar mau memilah sampah sesuai jenis dan nilai	Bank Sampah yang di fasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan untuk masyarakat bukit hibul	Membudayakan prilaku sadar akan pengelolaan sampah yang benar dapat menciptakan pola pikir, berbudaya dan berwawasan lingkungan dan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap perilaku SDM	Memorandum Of Understanding (MoU)	- Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah	2023 - 2024	- Pengelolaan sampah di kantor Dinas/Badan menjadi tanggungjawab Pihak Pertama (BPKPD) - Pengelolaan Sampah di Bank Sampah Induk Bukit Hibul menjadi tanggung jawab pihak kedua (DLHK)	Penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat apabila tidak terjadi kesepakatan dalam waktu 30 hari maka dilakukan mediasi, konsolidasi, arbitrase atau litigasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
							- Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan (DLHK)			

3	Kerjasama Dan Koordinasi Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Dalam Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara	2022	Menyelesaikan permasalahan - permasalahan hukum yang ada pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau, terkait bidang hukum perdata maupun bidang hukum tata usaha negara, baik secara litigasi maupun non litigasi	Perlindungan Hukum sesuai dengan pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing - masing pihak	Terciptanya suasana yang kondusif dan terselesaikannya permasalahan - permasalahan hukum yang ada pada badan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kab. Lamandau	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Lamandau	2023	Dibebankan kepada Pihak Kesatu (BPKBD)	Hal - hal yg belum diatur dalam perjanjian kerjasama akan dirundingkan bersama dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan (addendum) dan perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan maka di selesaikan secara musyawarah mufakat
4	Penerimaan pembayaran PBB P2, BPHTB dan PDL di Kabupaten Lamandau	2019	Sebagai pedoman bagi para pihak dalam pelaksanaan kerjasama layanan penerimaan pajak daerah kab. Lamandau secara host to host	Penerimaan pembayaran pajak daerah Kab. Lamandau melalui fasilitas payment channel dari pihak kesatu	Meningkatkan penerimaan pajak daerah Kab. Lamandau dan meningkatkan pelayanan dan mempermudah wajib pajak daerah dalam melaksanakan proses pembayaran pajak daerah	Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK)	PT. Pos PT. BPD PT. Bank Mandiri PT. BNI PT. BRI (PERSERO)	2022 - 2027	Wajib Pajak yang melakukan pembayaran PBB P2, BPHTB dan PDL mendapat bukti pembayaran berupa hasil print out / bukti transaksi	Data - Data wajib pajak bersifat rahasia
5	Pemungutan dan penyetoran pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi tenaga listrik dan pembayaran rekening listrik pemerintah daerah kabupaten Lamandau	2022	Untuk menjamin kelancaran penerimaan pendapatan asli daerah kab. Lamandau yang berasal dari wajib pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) yang meliputi tenaga listrik, yang menggunakan tenaga listrik	Mekanisme perhitungan PBJT meliputi tenaga listrik dari nilai jual tenaga listrik, informasi rekapitulasi penerimaan PBJT dan mekanisme penyetoran PBJT yang meliputi tenaga listrik	Kelancaran pelunasan rekening listrik pemerintah daerah kab. Lamandau, pendataan pengawasan dan penertiban PJU tidak resmi, meningkatkan efisiensi pembayaran rekening listrik pihak kedua melalui meterisasi PJU	Sinergi antara Pemerintah Kab. Lamandau dengan PT. PLN (PERSERO) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Palangka Raya	PT. PLN PT. BRI Tbk	2022 - 2026	Setoran dari Masyarakat yang memanfaatkan Listrik	Apabila terdapat situasi <i>Force Majeure</i> maka perjanjian kerjasama dapat ditangguhkan dahulu sampai kondisi stabil

6	Belanja Pegawai	2022	- Terselenggaranya pelaksanaan program aplikasi SIMGAJI, program Tabungan pensiun dan JKK/JKM	ASN meliputi PNS dan P3K, Tenaga Kontrak dan seluruh masyarakat kab. Lamandau yang menerima jaminan kesehatan masyarakat	- Tersedianya gaji yang akurat dan pelayanan tabungan pensiun serta jaminan kematian dan kecelakaan kerja	Kerjasama pemerintah daerah dengan pihak ketiga	PT. Taspen Persero	2013 - 2023	Anggaran Pendapatan dan Belanja Pegawai Daerah	Pihak ketiga memberikan pelayanan terbaik untuk pemerintah daerah kab. Lamandau dan selaku pemerintah daerah akan membayar kewajiban kepada pihak ketiga tepat waktu
			- Pelaksanaan program jaminan kesehatan		- pelayanan jaminan kesehatan		BPJS Kesehatan			
			- Pelaksanaan program JKK/JKM		- pelayanan jaminan kematian dan kecelakaan kerja		BPJS Ketenagakerjaan			
			- Pelaksanaan program tabungan perumahan		- pelayanan program tabungan perumahan		PT. BP-Tapera			

Nanga Bulik, 30 Mei 2023

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan
dan Pendapatan Daerah,

